

Analisis Persepsi *Stakeholder* atas *Sustainability Report*

Janssen Reksa Rantelangi¹, Ratna Ayu Damayanti², Sri Sundari³
{rexarantelangi19@gmail.com¹; damayantiss@yahoo.co.id²; sriamir_66@yahoo.com³}

Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin^{1,2,3}

Abstrak. Paradigma *triple bottom line* dalam industrialisasi telah mendorong perusahaan untuk melaksanakan dan mengungkapkan kinerja sosial dan lingkungan sebagaimana dilakukan pada kinerja keuangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi *stakeholder* eksternal PT Vale, yaitu masyarakat Kecamatan Nuha dan NGO yang bergerak dalam bidang sosial dan lingkungan, tentang legitimasi PT Vale melalui program CSR yang diungkapkan dalam *Sustainability Report* PT Vale. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari pernyataan langsung NGO dan masyarakat yang dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat kesesuaian antara harapan *stakeholder* dengan kinerja PT Vale melalui program CSR. Namun, masih terdapat dominasi kesenjangan legitimasi atas CSR PT Vale yang diungkapkan dalam *Sustainability Report* PT Vale.

Kata kunci: Legitimasi, Kesenjangan Legitimasi, *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Sustainability Report*.

Abstract. The *triple bottom line* paradigm in industrialization has encouraged companies to implement and disclose their social and environmental performance as well as their financial performance. This study aims to analyze the perceptions of PT Vale's external stakeholders, namely the people of Nuha District and NGOs engaged in social and environmental fields, about the legitimacy of PT Vale through its CSR program as disclosed in the PT Vale Sustainability Report. The data used in this study are primary data sourced from direct statements from NGOs and the community which were collected using in-depth interview techniques. The results of data collection were analyzed by qualitative methods using a descriptive approach. The results of the study illustrate that there is a congruence between stakeholder's expectations and PT Vale's performance through the CSR program. However, there is still a dominant gap in the legitimacy of PT Vale's CSR as disclosed in PT Vale's Sustainability Report.

Keyword: Legitimacy, Legitimacy Gap, *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Sustainability Report*.

1. Pendahuluan

Meluasnya industrialisasi membawa pengaruh terhadap perkembangan pasar bebas. Kegiatan bisnis, terutama yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam baik secara langsung maupun yang tidak langsung tentu memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya seperti masalah-masalah polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja, serta munculnya konflik lahan antara masyarakat lokal dan perusahaan. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah seperti ini, paradigma *triple bottom line* yang diperkenalkan Elkington (1998) menawarkan solusi alternatif dalam menjamin kepentingan perusahaan dalam meningkatkan profitnya, namun tidak mengabaikan kepentingan masyarakat serta pelestarian alam. Paradigma ini mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan, yaitu prinsip pembangunan yang menjamin tindakan manusia (kegiatan bisnis) hari ini tidak membatasi generasi mendatang dalam hal pilihan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Salah satu representasi langsung dari aktualisasi paradigma *triple bottom line* dalam perusahaan adalah adanya program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan perusahaan. CSR sendiri didefinisikan oleh Kotler dan Lee (2005) sebagai suatu komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis diskresioner serta kontribusi sumber daya perusahaan. Dalam hal ini, CSR mengacu pada aktivitas yang termanifestasi dari komitmen sukarela perusahaan dibanding tuntutan hukum atau hal yang bersifat moral atau etis sebagaimana yang diharapkan. Ghazali dan Chariri dalam Puspita (2015) menyatakan bahwa perusahaan memiliki kecenderungan untuk menggunakan kinerja berbasis sosial dan lingkungan atau CSR dan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan, yang

umumnya terealisasi dalam laporan tahunan (*Annual Report*) atau laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) agar dapat mempertahankan status legitimasinya di tengah masyarakat.

Legitimasi sendiri telah didefinisikan oleh Lindblom (1994) sebagai suatu kondisi atau status yang muncul ketika sistem nilai suatu entitas beriringan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang besar dimana entitas tersebut menjadi bagian di dalamnya. Ketika suatu disparitas, baik aktual maupun potensial hadir di antara kedua sistem nilai ini, maka akan menimbulkan suatu ancaman bagi keabsahan entitas tersebut. Ancaman ini dapat berbentuk hukum, ekonomi, maupun sanksi sosial lainnya. Untuk mengatasi ancaman legitimasi, perusahaan memerlukan strategi untuk mempertahankan atau menciptakan kesesuaian antara nilai sosial yang dilaksanakan perusahaan dengan nilai sosial yang diyakini oleh masyarakat. Dowling dan Pfeffer (1975) menguraikan beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk melegitimasi aktivitasnya ketika menghadapi ancaman terhadap status legitimasinya. Pertama, perusahaan dapat menyesuaikan output, tujuan, dan metode operasinya dengan definisi legitimasi yang berlaku. Kedua, perusahaan dapat melakukan komunikasi dengan masyarakat untuk mengubah definisi legitimasi sosial sehingga dapat sesuai dengan kegiatan, output, dan nilai perusahaan yang sekarang. Ketiga, perusahaan dapat mencoba melalui komunikasi untuk dapat teridentifikasi dengan simbol, nilai, atau institusi yang mempunyai dasar kuat dalam legitimasi. Teori legitimasi menyediakan motivasi teoritis bagi perusahaan dalam mengungkapkan tanggungjawab sosial dan lingkungannya serta memberikan penerangan mengenai peran akuntan dalam menyediakan informasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

PT Vale Indonesia Tbk sebagai perusahaan yang melaksanakan operasionalnya di lingkungan sosial masyarakat pun tidak luput dari kebutuhan akan status legitimasi. Untuk itu, *Sustainability Report* juga digunakan oleh PT Vale sebagai salah satu strategi legitimasinya. *Global Reporting Index* (GRI) mendefinisikan *Sustainability Report* sebagai praktek pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. *Sustainability Report* memuat informasi kinerja keuangan dan informasi non-keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang lebih menekankan pada prinsip dan standar pengungkapan yang mampu mencerminkan tingkat aktivitas perusahaan secara menyeluruh sehingga memungkinkan perusahaan bisa tumbuh secara berkesinambungan. Di Indonesia, keberadaan *Sustainability Report* didukung dengan adanya landasan hukum, yaitu peraturan BAPEPAM Nomor KEP-431/BL/2012 tentang penyampaian tahunan emitem atau perusahaan publik yang menjadikan *Sustainability Report* sebagai pelaporan yang bersifat wajib dan dapat disajikan dalam laporan tahunan atau terpisah dari laporan tahunan.

PT Vale telah melakukan pengungkapan kinerja sosial, lingkungan, dan ekonominya melalui *Sustainability Report* sejak tahun 2017. Untuk dapat mengobjektifikasi kesesuaian antara pengungkapan yang dilakukan oleh PT Vale dengan realitas di lapangan, maka diperlukan pandangan dari berbagai pihak yang relevan dengan pengungkapan tersebut. *Non-Governmental Organization* (NGO) dan masyarakat lokal merupakan contoh dari *stakeholder* yang relevan dengan pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan PT Vale. NGO merupakan organisasi yang memainkan peran penting dalam mewakili pandangan kelompok khusus seperti masyarakat yang memiliki pengaruh ekonomi rendah terhadap perusahaan atau memberikan pandangan berkaitan dengan isu-isu sosial dan lingkungan. Mereka terkadang bertindak untuk mengimbangi aktivitas dan opini kelompok kepentingan yang memiliki kekuatan ekonomi yang tinggi dalam perusahaan. Sementara itu, masyarakat lokal yang dianggap relevan dengan pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan PT Vale merupakan kelompok masyarakat lokal yang mengalami dampak langsung operasional PT Vale serta merupakan pihak yang secara langsung merasakan kinerja sosial dan lingkungan PT Vale melalui berbagai program CSR perusahaan. Oleh karena itu, untuk memahami secara lebih mendalam kinerja lingkungan dan sosial PT Vale yang terealisasi dalam program CSR perusahaan, maka pandangan atau persepsi NGO dan masyarakat lokal sangat diperlukan untuk melihat dari sisi lain realitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan dalam *Sustainability Report-nya*. Pandangan NGO dan masyarakat lokal juga menjadi dasar untuk memberikan penilaian tentang legitimasi PT Vale dalam melanjutkan kegiatan operasionalnya.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menghadirkan suatu gambaran spesifik tentang hubungan, keadaan, serta tatanan sosial. Suatu penelitian deskriptif dimulai dengan suatu masalah atau pertanyaan yang jelas serta mencoba untuk mendeskripsikannya secara akurat sehingga menghasilkan gambaran atau jawaban terperinci tentang suatu masalah atau pertanyaan (Newman, 1997). Pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, yaitu objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Dengan demikian, dalam penelitian ini, persepsi masyarakat dan NGO tentang CSR PT Vale dalam *Sustainability Report* dideskripsikan berdasarkan keadaan sesungguhnya tanpa adanya manipulasi atau perubahan dalam informasi tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Teknik wawancara mendalam digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana peneliti dapat meminta ide-ide, pendapat, motivasi, maupun persepsi narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini merupakan masyarakat dan NGO yang relevan dengan pengungkapan CSR yang dilakukan PT Vale, yaitu masyarakat Kecamatan Nuha serta NGO yang bergerak dalam bidang sosial dan lingkungan. Masyarakat Kecamatan Nuha dipilih sebagai subjek penelitian sehubungan dengan operasional penambangan PT Vale yang berpusat di kecamatan tersebut. Sementara itu, NGO yang menjadi subjek penelitian merupakan NGO yang pernah atau sedang melakukan kajian dan advokasi terhadap aktivitas operasional PT Vale.

Data yang diperoleh di lapangan disajikan secara deskriptif dengan mengikuti alur analisis data model interaktif. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data terbagi menjadi tiga, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan dari data yang telah dianalisis dijustifikasi berdasarkan teori legitimasi untuk menghasilkan gambaran tentang legitimasi dari NGO dan masyarakat atas CSR dalam *Sustainability Report* PT Vale.

3. Hasil Penelitian

3.1 Deskripsi Subjek Penelitian

Data dalam penelitian ini berasal dari pernyataan langsung narasumber yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok *stakeholder* eksternal, yaitu masyarakat dan NGO. Narasumber dari kelompok masyarakat berjumlah enam orang, sementara dari kelompok NGO terdiri dari lima orang yang berasal dari tiga NGO yang berbeda, yaitu Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (Walhi Sulsel), Perkumpulan Jurnalis Advokasi Celebes (Jurnal Celebes), dan Wahana Lingkungan Lestari Celebes Area (Wallacea). Berikut ini daftar narasumber dalam penelitian ini.

Tabel 1. Daftar Narasumber dari Kelompok Masyarakat

Nama	Peran dalam masyarakat
Bapak Tahwil	Sekretaris Desa Nuha
Bapak Yunus Ambeta	Masyarakat adat To' Karunsi'e Dongi
Ibu Helda	Sekretaris Desa Sorowako
Bapak Sutrisno	Petani di Desa Sorowako
Bapak Amir Latto	Kepala Lingkungan Lawewu, Kelurahan Magani
Bapak Ferianto	Kepala Dusun Rusunawa, Desa Sorowako

Tabel 2 Daftar Narasumber dari Kelompok NGO

Nama	Basis NGO
Bapak Riski Saputra	Perkumpulan Jurnalis Advokasi Lingkungan Celebes (Jurnal Celebes)
Bapak Ferdhiyadi N.	Perkumpulan Jurnalis Advokasi Lingkungan Celebes (Jurnal Celebes)
Bapak Slamet Riyadi	Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (Walhi Sulsel)

Bapak Afiandi

Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (Walhi Sulsel)

Bapak Asri Bandang

Wahana Lingkungan Lestari Celebes Area (Wallacea)

3.2 Dampak Operasional Penambangan PT Vale

1. Konflik lahan antara masyarakat dan PT Vale
Konsesi atau klaim PT Vale atas lahan untuk aktivitas penambangan dianggap membatasi masyarakat dalam memanfaatkan lahan dalam berbagai hal, seperti membuka lahan pertanian serta untuk melakukan pembangunan. Berdasarkan perspektif masyarakat lokal, kondisi ini membatasi ruang hidup bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas mereka.
2. Adanya polusi udara serta guncangan akibat kegiatan penambangan PT Vale
Salah satu area tambang yang dibuka PT Vale memiliki jarak yang cukup dekat dengan wilayah pemukiman. Hal ini mengakibatkan debu yang berasal dari area tambang cukup mengganggu aktivitas masyarakat yang bermukim di dekat area tambang tersebut. Selain itu, kegiatan peledakan di area tambang tersebut juga menjadi gangguan bagi masyarakat karena sering kali menyebabkan guncangan yang dirasakan hingga area pemukiman.
3. Meningkatnya pencemaran air di beberapa lokasi akibat aktivitas penambangan PT Vale
Salah satu bentuk akibat dari aktivitas penambangan PT Vale adalah pencemaran air yang disebabkan oleh tumpahan limbah sulfur yang terdapat di pesisir Pulau Mori serta sedimentasi lumpur di Danau Mahalona. Pencemaran di perairan Pulau Mori selain menyebabkan kerusakan lingkungan, juga mengganggu aktivitas nelayan yang bekerja di wilayah sekitar Pulau Mori. Sementara itu, sedimentasi yang terjadi di Danau Mahalona menyebabkan penumpukan lumpur di Danau Mahalona sehingga danau tersebut mengalami pendangkalan yang semakin tinggi.
4. Meningkatnya pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan lokasi penambangan
Salah satu dampak lingkungan yang secara umum ditimbulkan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan adalah deforestasi atau alih fungsi hutan. PT Vale sendiri selama beroperasi telah mengalihfungsikan ribuan hektar hutan untuk dijadikan area tambang. Hal ini tentunya menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup signifikan.

3.3 Realisasi Program CSR PT Vale

1. Pembangunan Lamoare Park dan Magani Park di Kecamatan Nuha
Sebagai daerah kawasan wisata dalam program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Vale, Kecamatan Nuha membutuhkan fasilitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bidang pariwisata. Untuk itu, PT Vale menunjang kebutuhan dana untuk pembangunan fasilitas tersebut, yang terealisasi dalam pembangunan dua Ruang Terbuka Hijau, yaitu RTH Lamoare (Lamoare Park) yang terletak di Desa Sorowako, dan RTH Magani (Magani Park) yang terletak di Kelurahan Magani. Adapun kedua RTH ini merupakan hasil kerjasama antara PT Vale dan desa serta kelurahan yang tergabung dalam kawasan wisata PPM PT Vale.
2. Rehabilitasi pascatambang serta penyediaan bibit tanaman di Kecamatan Nuha
Dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, PT Vale memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kondisi area bekas tambang menjadi hutan kembali seperti semula. Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, PT Vale memiliki fasilitas *Nursery* yang berfungsi menyediakan bibit tanaman untuk nantinya digunakan dalam merehabilitasi lahan pascatambang. Selain digunakan untuk kegiatan rehabilitasi lahan pascatambang, bibit hasil dari *Nursery* PT Vale juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara gratis. Keberadaan *Nursery* PT Vale ini tentunya membawa dampak yang positif serta dapat memenuhi kebutuhan tertentu masyarakat.

4. Pembahasan

4.1 Persepsi Masyarakat Terhadap CSR PT Vale

Setiap perusahaan membutuhkan pengakuan atau legitimasi atas status keberadaannya untuk dapat bertahan dan melanjutkan kegiatan operasionalnya di tengah suatu kelompok sosial seperti masyarakat. Hal ini dilandaskan pada kontrak sosial yang terbentuk antara perusahaan dengan anggota masyarakat. Deegan (2002) menjelaskan bahwa ketika masyarakat merasa tidak puas dengan cara perusahaan beroperasi

dalam hal penerimaan dan sikap perusahaan, maka masyarakat dapat mencabut kontrak perusahaan untuk melanjutkan operasionalnya. Oleh karena itu, untuk dapat mempertahankan status legitimasinya di tengah nilai-nilai sosial yang berlaku dimana PT Vale menjadi bagian di dalamnya, PT Vale mencoba untuk mempengaruhi persepsi masyarakat melalui pengungkapan kinerja sosial dan lingkungannya serta implementasi program CSR yang terpublikasi dalam *Sustainability Report* PT Vale. Praktik CSR menurut Neimark dalam Gray dkk. (1995) digunakan oleh berbagai perusahaan untuk membangun diri mereka sendiri serta hubungan mereka dengan kelompok lainnya sebagaimana mereka berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi keberlanjutan profitabilitas dan pertumbuhannya. Lebih lanjut lagi, Lehman (1992) memadamkan bahwa CSR hadir untuk merasionalkan serta memberikan alasan keberadaan perusahaan, dengan tidak hanya menjelaskan efektivitas manajemen, tapi melegitimasi kekuatan perusahaan serta mempertahankan kepercayaan diri. Atas dasar gagasan tersebut, CSR menjadi salah satu strategi perusahaan dalam mempertahankan status legitimasinya di tengah kelompok masyarakat (Deegan, 2002).

Salah satu program implementasi CSR PT Vale dilaksanakan dalam bentuk program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM). Salah satu realisasi PPM yang dibuat oleh PT Vale di Kecamatan Nuha ialah Lamoare Park (RTH Lamoare) dan Magani Park (RTH Magani). Berdasarkan hasil wawancara, terdapat masyarakat yang menerima manfaat yang baik dengan keberadaan fasilitas RTH tersebut. RTH menjadi tempat berinteraksi, berekreasi, dan berolahraga bagi banyak orang. RTH menjadi fasilitas dengan daya tarik tersendiri bagi berbagai kalangan.

“Biasanya RTH itu dipakai sama masyarakat sekitar sini untuk jogging atau rekreasi. Kan di atas jugaitu ada taman bermainnya juga untuk anak-anak. Biasanya itu kalau sore itu ramai masyarakat di atas.”

Selain menjadi fasilitas yang secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beraktivitas, pembangunan RTH juga dianggap memiliki potensi untuk mendorong perekonomian Kecamatan Nuha kedepannya. Peningkatan kapasitas pengelola yang berasal dari kalangan masyarakat serta upaya mendorong perekonomian yang mandiri merupakan potensi yang diharapkan terwujud melalui pembangunan RTH tersebut.

“Jadi perusahaan (PT Vale) itu mendorong kita untuk membuat program. Berjalannya nanti itu semua, kegiatan-kegiatan dan pengelolannya, BUMDes dan BUMDesMa yang kerjakan. Jadi kita didorong untuk buat kegiatan itu yang kira-kira ada nilai ekonomisnya di dalam. Jadi dikembalikan ke kita. Vale itu cuma support dana saja. Juga ada pelatihan SDM juga untuk pengelolannya. Kita sendiri di desa yang memanfaatkan itu. Kalau mereka ikut langsung setelah program mungkin tidak. Jadi semua SDM kitayang siapkan, semua kegiatan kita yang siapkan dan kelola.”

Meskipun terdapat kalangan masyarakat yang memandang bahwa CSR PT Vale dalam bentuk pembangunan RTH telah berkontribusi terhadap pengembangan Kecamatan Nuha, terdapat pula masyarakat yang masih belum merasakan manfaat dari keberadaan RTH Magani dan RTH Lamoare. Fasilitas yang dibangun PT Vale tersebut oleh beberapa kalangan masyarakat dianggap kurang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Dalam hal ini, program pemberdayaan masyarakat PT Vale yang direalisasikan dengan membangun fasilitas RTH dianggap kurang mampu meningkatkan kesejahteraan berbagai kalangan masyarakat. Dengan kata lain, manfaat program CSR yang diwujudkan dalam bentuk RTH tidak dapat dirasakan oleh semua kalangan secara merata.

“Khusus di Kecamatan Nuha ini saya bisa berikan gambaran bahwa kontribusi PT Vale ke masyarakat memang ada dananya. Tapi itu terjalin dalam suatu wadah namanya BKAD (Badan Kerjasama Antardesa). Kebetulan di Kecamatan Nuha ini termasuk kawasan wisata. Makanya baru-baru ini kami dikirim untuk studi tiru ke Jogja, Bandung, Medan. Artinya memang PT Vale itu ada kontribusi. Cuma masalahnya tidak semua masyarakat bisa nikmati.”

Realitas sosial tentang CSR PT Vale yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota masyarakat Nuha menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas antara perilaku perusahaan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di kalangan masyarakat. Disparitas tersebut terjadi karena PT Vale masih belum sepenuhnya menyesuaikan kinerja perusahaan dengan harapan masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai macam masalah yang dihadapi masyarakat akibat

operasional PT Vale, seperti keterbatasan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas RTH, adanya batasan bagi masyarakat dalam memanfaatkan lahan konsesi PT Vale, serta adanya dampak lingkungan akibat aktivitas operasional PT Vale yang dianggap mengganggu kesejahteraan beberapa kalangan masyarakat. Adanya disparitas antara kinerja PT Vale dengan harapan atau nilai sosial dalam masyarakat Nuha dapat memicu timbulnya ancaman terhadap legitimasi perusahaan, baik dalam bentuk hukum, ekonomi, maupun sanksi sosial lainnya (Dowling dan Pfeffer, 1975).

Meskipun masih terdapat potensi ancaman legitimasi atas operasional PT Vale, hal itu dapat ditekan dengan adanya kinerja sosial dan lingkungan yang nilainya selaras dengan harapan masyarakat. Hal ini diwujudkan oleh PT Vale dalam bentuk program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang terealisasi melalui pembangunan RTH Magani dan Lamoare. Pembangunan kedua RTH tersebut sebagai bagian dalam program CSR PT Vale nyatanya mampu mempengaruhi persepsi masyarakat, bahwa PT Vale layak untuk berada dalam lingkungan Masyarakat Nuha serta memanfaatkan sumber daya di dalamnya. Dengan demikian, CSR sebagai salah satu strategi legitimasi perusahaan untuk tetap bertahan dan memanfaatkan sumber daya (Suchman, 1995) yang dilaksanakan oleh manajemen PT Vale telah mampu menjawab harapan masyarakat akan perilaku atau tindakan perusahaan yang mereka inginkan. Hal ini dibuktikan dengan persepsi masyarakat yang secara implisit menyatakan bahwa program CSR PT Vale dalam bentuk program PPM yang diwujudkan melalui pembangunan RTH merupakan kinerja perusahaan yang memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa CSR PT Vale sebagaimana yang telah dilaporkan dalam *Sustainability Report* PT Vale, telah mempengaruhi persepsi masyarakat bahwa perusahaan dapat menciptakan keselarasan antara harapan masyarakat dengan aktivitas dan perilaku perusahaan (O'Donovan, 2002). Dalam hal ini, harapan masyarakat adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta peningkatan pertumbuhan ekonomi Kecamatan Nuha, sementara aktivitas atau kinerja PT Vale yang dapat mewujudkan harapan tersebut terealisasi dengan pembangunan RTH yang dibangun di Kecamatan Nuha. Singkatnya, melalui strategi CSR, PT Vale dapat mempertahankan status legitimasinya berdasarkan perspektif masyarakat Kecamatan Nuha.

4.2 Persepsi Non-Governmental Organization (NGO) Terhadap Program CSR PT Vale

Non-Governmental Organization (NGO) atau yang biasa dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki peran sentral sebagai salah satu *stakeholder* eksternal suatu perusahaan. NGO pada umumnya melakukan pengawalan terhadap isu sosial atau lingkungan tertentu secara terorganisir. O'Dwyer (2005) memandang NGO sebagai organisasi yang memainkan peran penting dalam mewakili pandangan kelompok masyarakat tertentu. Mereka memiliki kemampuan untuk menjangkau kelompok yang paling miskin dan paling tidak beruntung serta memberikan suara bagi mereka yang tidak cukup didengar. Dengan demikian, mereka dapat bertindak untuk menyeimbangkan kegiatan dan pendapat dari kepentingan lain yang lebih kuat secara ekonomi dimasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga NGO yang menjadi narasumber dalam penelitian, dapat diketahui bahwa masih terdapat sikap ragu atau skeptis dari NGO terhadap pengungkapan CSR PT Vale dalam *Sustainability Report* PT Vale. Keraguan ini disebabkan kurangnya informasi yang dimuat dalam *Sustainability Report* terkait kinerja sosial dan lingkungannya.

“Permasalahan rehabilitasi lahan tidak hanya soal kembali seperti semula. Tapi apakah dia melaksanakan itu, dimana lokasinya, itu semua yang harus dilihat. laporan detailnya lahh, karena yang ditonjolkan di laporan itu lebih ke sosial lahh, seperti pemberdayaan masyarakat. Nahh ini cuma menduga saja, jangansampai dana CSR itu digunakan untuk alokasi rehabilitasi lahan juga. Itu yang harus di cross check, apakah ada alokasi dana CSR yang digunakan untuk pemulihan di wilayah yang tadi dibilang harus direhabilitasi. Perusahaan punya kewajiban untuk mereklamasi dan merehabilitasi itu dengan dana yanglain, bukan dana CSR-nya. Itu kewajibannya perusahaan. Jangan sampai mereka gunakan dana CSR untuk mereklamasi atau merehabilitasi. Cuma kan kita belum menemukan alokasi dana CSR itu berapa.”

Sikap skeptis terhadap program CSR PT Vale juga disampaikan oleh narasumber dari NGO yang berbeda, yaitu Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel. Narasumber dari Walhi berpendapat bahwa terdapat indikasi bahwa PT Vale kurang berkomitmen dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Hal ini berkaitan dengan pencemaran limbah sulfur di perairan Pulau Mori.

“Kasus lingkungan yang terbaru berkaitan dengan PT vale itu pencemaran sulfur di pesisir Pulau

Mori. Jadi kan kemarin ada pencemaran di Pulau Mori. Itu di muara sungainya, bukan daerah hulunya, dimana PT Vale melakukan tambang Nikel. Kemarin juga saya kesana (Pulau Mori), dan katanya sudah dibersihkan oleh perusahaan. Tapi waktu saya periksa, masih ada sisa-sisa sulfurnya. Kan susah itu, karnatumpahnya sebenarnya bukan di Pulau Mori-nya, tapi di perairannya. Makanya, lokasinya itu bukan cuma di satu titik, tapi menyebar karna di perairan. Yang saya dapat kemarin itu di belakang rumah warga. Warga juga cerita, katanya kalau malam-malam itu kapal pengangkut (tongkang) PT Vale itu sering dicuci di laut. Pencuciannya itu harusnya tidak dilakukan di laut karena ada pasir-pasirnya. Itulah yang menyebar ke laut.”

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh narasumber dari NGO, dapat disimpulkan bahwa pandangan NGO terhadap realisasi CSR PT Vale yang terpublikasi dalam *Sustainability Report* masih skeptis atau terdapat keraguan di dalamnya. Hal ini disebabkan karena informasi yang disampaikan masih kurang detail untuk menggambarkan secara keseluruhan realitas CSR yang dilakukan oleh PT Vale. Kurangnya informasi yang diungkapkan menyebabkan dasar penilaian kinerja sosial dan lingkungan perusahaan tidak mencukupi untuk dinilai secara objektif. Skeptisme ini juga didorong oleh adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT Vale di masa lalu berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Selain itu, alasan dari sikap skeptis NGO ini juga disebabkan oleh pandangan bahwa perencanaan manajemen lingkungan yang belum matang serta realisasinya yang dianggap kurang memiliki komitmen secara berkelanjutan.

4.3 CSR PT Vale Berdasarkan Teori Legitimasi

Masyarakat dan NGO merupakan *stakeholder* eksternal dari suatu perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi status legitimasi perusahaan. PT Vale sebagai salah satu perusahaan yang beraktivitas di lingkungan masyarakat membutuhkan status legitimasi agar dapat menjalankan operasionalnya secara berkelanjutan. Untuk itu, CSR menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh PT Vale untuk mempertahankan status legitimasinya. Realisasi CSR yang dilakukan oleh PT Vale di lapangan memiliki pengaruh terhadap persepsi masyarakat dan NGO dalam menentukan status legitimasi perusahaan. Hal ini dikarenakan masyarakat dan NGO merupakan pihak yang secara langsung merasakan dan mengawasi pelaksanaan CSR PT Vale di lapangan. Oleh karena itu, persepsi dari NGO dan masyarakat perlu diperhatikan oleh perusahaan untuk menjadi evaluasi dan strategi pelaksanaan CSR-nya.

Status legitimasi sendiri merupakan hal yang penting untuk diperoleh dan dipertahankan suatu perusahaan. Lindblom dalam Deegan (2002) mendefinisikan legitimasi sebagai suatu kondisi atau status yang muncul manakala sistem nilai suatu entitas sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana entitas tersebut menjadi bagian di dalamnya. Ketika terjadi suatu disparitas, baik aktual maupun potensial muncul di antara kedua sistem nilai, maka akan muncul pula ancaman terhadap legitimasi entitas tersebut. Ancaman legitimasi ini dijelaskan oleh Sethi dalam O'Donovan (2002) sebagai kesenjangan legitimasi atau *legitimacy gap*, yang berarti ketidaksesuaian antara harapan dan persepsi masyarakat terhadap aktivitas perusahaan dengan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh perusahaan di lapangan.

Secara garis besar, hubungan antara harapan dan persepsi masyarakat dan NGO dengan aktivitas dan tindakan aktual PT Vale dalam menjalankan operasionalnya, dalam hubungannya dengan status legitimasi PT Vale dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. Peristiwa (Event) dan Legitimasi PT Vale

Event (Peristiwa)	
Harapan dan persepsi masyarakat dan NGO terhadap kinerja PT Vale	1. Perhatian PT Vale terhadap kesejahteraan masyarakat lokal To' Karunsi'eDongi.
	2. Bentuk CSR yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
	3. Adanya kemudahan bagi masyarakat dalam memanfaatkan lahan konsesi PT Vale untuk kebutuhan pokok.
	4. PT Vale diharapkan mampu meningkatkan manajemen pengendalian dampak lingkungan, utamanya di perairan sekitar Pulau Mori.
	5. PT Vale diharapkan dapat mengurangi dampak lingkungan dengan memperjauh jarak antara lokasi tambang dengan area pemukiman

	warga.
	6. PT Vale diharapkan menghentikan laju sedimentasi di Danau Mahalona akibat aktivitas penambangan.
	7. PT Vale diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengungkapan kinerjasosial dan lingkungan agar dapat dinilai secara objektif oleh pengguna laporan keberlanjutan.
Kesesuaian antara harapan masyarakat dengan tindakan aktual PT Vale (prakondisi legitimasi PT Vale)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan RTH Magani dan Lamoare yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kecamatan Nuha. 2. Pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan RTH Magani dan Lamoare yang diyakini dapat meningkatkan potensi sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Nuha. 3. Adanya kegiatan rehabilitasi lahan pascatambang yang dilakukan PT Vale. 4. Adanya fasilitas <i>Nursery</i> yang outputnya selain digunakan untuk rehabilitasi pascatambang, juga dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat.
Tindakan dan aktivitas aktual PT Vale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penambangan di wilayah yang jaraknya kurang dari satu kilometer dari area pemukiman yang mengganggu aktivitas masyarakat. 2. Pencemaran di perairan Pulau Mori yang disebabkan aktivitas distribusi hasil tambang yang dilakukan dengan menggunakan kapal pengangkut. 3. Aktivitas penambangan terbuka yang dilakukan PT Vale yang dianggap mengganggu kelestarian lingkungan. 4. Adanya aktivitas penambangan yang menyebabkan sedimentasi di Danau Mahalona.

Dari tabel di atas diperoleh kesimpulan bahwa PT Vale telah melakukan empat kegiatan yang dalam konteks teori legitimasi, telah sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Untuk itu, sebagaimana yang disampaikan oleh O'Donovan, untuk tetap bertahan dalam lingkungan masyarakat, sasaran utama yang perlu dicapai oleh PT Vale untuk mempertahankan status legitimasinya adalah meningkatkan kinerja perusahaan yang sesuai dengan harapan dan persepsi masyarakat. Hal ini juga penting dilakukan untuk mengurangi kesenjangan legitimasi yang berpotensi timbul antara masyarakat dan NGO dengan PT Vale sebagai organisasi yang beraktivitas dalam lingkungan dan sistem sosial masyarakat.

4.4 Implikasi Persepsi Masyarakat dan NGO atas Sustainability Report PT Vale Terhadap Status Legitimasi PT Vale Indonesia Tbk.

Legitimasi dipandang sebagai cara untuk mempertahankan keberlangsungan suatu organisasi untuk beroperasi di lingkungan masyarakat yang dicapai melalui tindakan organisasi yang sesuai nilai sosial dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat (O'Donovan, 2002). Berdasarkan hal tersebut, Deegan (2002) menyatakan bahwa selaras dengan pandangan bahwa organisasi merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih besar, perspektif yang ditawarkan teori legitimasi, yang dibangun atas dasar teori ekonomi politik, mengindikasikan bahwa organisasi tidak memiliki hak inheren atas sumber daya, atau bahkan untuk menyatakan keberadaannya. Keberadaan suatu organisasi di tengah masyarakat dibangun atas dasar kontrak sosial, yang manakala masyarakat menganggap bahwa organisasi melanggar kontrak sosial tersebut, maka keberadaan organisasi tersebut akan mengalami ancaman untuk bertahan.

Sustainability Report merupakan salah satu bentuk pengungkapan yang dilakukan perusahaan yang secara komprehensif menggambarkan kinerja perusahaan baik dalam bidang ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan dalam *Sustainability Report* menjadi salah satu strategi perusahaan untuk memengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat untuk dapat tetap mempertahankan status legitimasi perusahaan di tengah kelompok masyarakat. PT Vale sebagai salah satu perusahaan multinasional juga melaksanakan strategi legitimasi dengan melakukan pengungkapan kinerja sosial dan lingkungannya dalam *Sustainability Report* PT Vale. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Nuha dan beberapa NGO tentang persepsi masyarakat dan NGO tentang

Sustainability Report PT Vale, dapat ditarik kesimpulan tentang bagaimana persepsi masyarakat dan NGO tentang kualitas pengungkapan dan informasi yang disampaikan PT Vale dalam *Sustainability Report*-nya.

Dari sudut pandang NGO, beberapa narasumber menganggap bahwa informasi yang disampaikan oleh PT Vale dalam *Sustainability Report*-nya masih belum memberikan gambaran dan rincian yang jelas tentang upaya PT Vale dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, NGO juga menyatakan kritik terhadap informasi dalam *Sustainability Report* PT Vale berkaitan dengan pengelolaan effluen dan limbah. Berdasarkan pernyataan dari NGO, terdapat limbah sulfur yang mencemari perairan Pulau Mori yang disebabkan oleh aktivitas operasional PT Vale. Selain itu, terdapat pula sedimentasi di Danau Mahalona yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan PT Vale. Jika dikaitkan dengan standar pelaporan yang digunakan oleh PT Vale, yaitu *Global Reporting Initiative* (GRI), maka seharusnya PT Vale juga melaporkan terkait limbah sulfur yang dibuang ke perairan tersebut. Hal ini merujuk pada GRI 306-3 tentang Tumpahan yang Signifikan, bahwa perusahaan harus melaporkan informasi terkait volume, lokasi, jenis, serta dampak tumpahan limbah yang signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi NGO tentang informasi yang diungkapkan dalam *Sustainability Report* masih mengalami kesenjangan legitimasi yang disebabkan karena NGO memandang bahwa informasi dalam *Sustainability Report* PT Vale masih belum menggambarkan keseluruhan kinerja lingkungan serta masih terdapat perbedaan antara realitas di lapangan dengan informasi yang dilaporkan PT Vale dalam *Sustainability Report*-nya.

Sementara itu, dari perspektif masyarakat Kecamatan Nuha, terdapat pandangan yang berbeda-beda antara anggota masyarakat terkait informasi yang disampaikan PT Vale dalam *Sustainability Report*-nya. Menurut beberapa kalangan masyarakat, informasi yang disampaikan oleh PT Vale dalam *Sustainability Report* sudah sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini berkaitan dengan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang informasinya dimuat dalam *Sustainability Report* PT Vale tahun 2020. Selain dalam hal pengungkapan dalam bidang pengembangan masyarakat lokal, kesesuaian antara informasi *Sustainability Report* PT Vale dengan fakta lapangan juga dibuktikan dengan adanya rehabilitasi lahan yang secara empirik disaksikan langsung oleh anggota masyarakat. Namun, di sisi lain, berdasarkan wawancara dengan anggota masyarakat lainnya, ditemukan fakta bahwa masih terdapat informasi yang belum dimuat PT Vale dalam *Sustainability Report* berkaitan dengan operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat lokal (GRI 413-2). Fakta aktual di lapangan berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kegiatan operasi PT Vale yang memiliki dampak negatif terhadap masyarakat lokal, di antaranya jarak area tambang dengan pemukiman yang sangat dekat yang mengakibatkan polusi udara serta guncangan yang dirasakan masyarakat dari lokasi penambangan, polusi air di Pulau Mori yang mengganggu aktivitas masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, serta adanya batasan bagi masyarakat dalam memanfaatkan lahan yang telah diklaim PT Vale. Adanya informasi signifikan yang tidak dimuat dalam *Sustainability Report* ini menimbulkan persepsi negatif dari beberapa kalangan masyarakat tentang kinerja sosial dan lingkungan yang diungkapkan PT Vale. Hal ini berdampak terhadap status legitimasi PT Vale yang berpotensi menimbulkan adanya kesenjangan legitimasi.

5. Kesimpulan

Persepsi NGO atas informasi CSR yang diungkapkan PT Vale dalam *Sustainability Report* menunjukkan adanya keraguan atas kesesuaian informasi yang diungkapkan dengan fakta aktual di lapangan. Karenanya, masih terdapat *legitimacy gap* yang muncul antara nilai yang dilaksanakan PT Vale dengan nilai sosial yang diharapkan oleh NGO. Sementara itu, persepsi masyarakat atas informasi CSR yang diungkapkan PT Vale dalam *Sustainability Report* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan masyarakat tentang legitimasi PT Vale melalui pengungkapan *Sustainability Report*-nya. Di satu sisi, terdapat anggota masyarakat yang memandang bahwa informasi yang diungkapkan PT Vale sudah sesuai dengan kontribusi aktualnya di lapangan sehingga memandang bahwa PT Vale sudah layak beroperasi di lingkungan masyarakat. Di sisi lain, terdapat kalangan masyarakat yang menganggap bahwa masih terdapat informasi yang signifikan terkait kinerja sosial dan lingkungan PT Vale yang belum diungkapkan dalam *Sustainability Report*, sehingga berpotensi menimbulkan *legitimacy gap* atas status legitimasi PT Vale.

6. Keterbatasan Penelitian

Isu yang diangkat dalam penelitian ini hanya berkaitan dengan beberapa aspek kinerja sosial dan lingkungan PT Vale yang ada dalam *Sustainability Report* PT Vale. Oleh karena itu, hasil dalam

penelitian ini tidak menggambarkan keseluruhan aspek dalam *Sustainability Report* PT Vale. Selain itu, wilayah pemberdayaan masyarakat yang menjadi subjek penelitian hanya terbatas pada wilayah pengembangan pariwisata yang ada di Kecamatan Nuha. Dengan demikian, kesimpulan yang diberikan dalam penelitian ini berlandaskan pada persepsi beberapa orang narasumber yang relevan dengan pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan dalam *Sustainability Report* PT Vale. Oleh karena itu, persepsi yang diberikan oleh narasumber tidak dapat digeneralisasi untuk memberikan kesimpulan yang menyeluruh tentang efektifitas pengelolaan lingkungan dan sosial PT Vale.

Daftar Pustaka

- Beal, B. D. 2014. *Corporate Social Responsibility: Definition, Core Issues, and Recent Developments*. Los Angeles: Sage Publications, Ltd.
- Carroll, A. B. 1991. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. *Business Horizon*, 34 (4): 39-48.
- Colleoni, Elanor. 2013. CSR Communication Strategies for Organizational Legitimacy in Social Media. *Corporate Communications: An International Journal*, 18 (2): 228 – 248.
- Deegan, C. M. 2002. Introduction: The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures – A Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, 15 (3): 282-311.
- Deegan, C. M. 2019. Legitimacy Theory: Despite It's Enduring popularity and Contribution, Time is Right for a Necessary Makeover. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32 (8): 2307-2329.
- Dowling, J. dan Pfeffer, J. 1975. Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, 8 (1): 122- 136.
- Elkington, J. 1997. *Cannibal with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone.
- Global Reporting Initiative (GRI). 2016. *GRI Standards*. Amsterdam: Global Sustainability Standards Board (GSSB).
- Gray, R.H., Kouhy, R., dan Lavers, S. 1995. Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of the Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8 (2): 47-77.
- Kotler, P. dan Lee, N. 2005. *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Lindawati, A. dan Puspita, M. 2015. Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2 (1): 89-109.
- Mistry, V., Sharma, U., dan Low, M. 2014. Management Accountants' Perception of Their Role in Accounting for Sustainable Development: An Exploratory Study. *Pacific Accounting Review*, 206 (1-2): 112-133.
- O'Donovan, Gary. 2002. Environmental Disclosures in the Annual Report: Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, 15 (3): 344-347.
- O'Dwyer, B. 2002. Managerial Perceptions of Corporate Social Disclosure: An Irish Story. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15 (3): 406-436.
- O'Dwyer, B., Jeffrey, U., dan Bradley, J. 2005. Perception of the Emergence and Future Development of Corporate Social Disclosure in Ireland: Engaging the Voices of Non-Governmental Organisation. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, 18 (1): 14-43.
- Rijali, A. 2019. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17 (33): 81-95.
- Sekaran U. dan Bugie, R. 2016. *Research Methods for Business (7th edition)*. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Suchman, M. C. 1995. Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approach. *The Academy of Management Review*, 20 (3): 571-611.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.